

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fertilitas yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan perekonomian sehingga mengantarkan masyarakat kepada kemiskinan. Semakin besar pertumbuhan penduduk, maka semakin besar tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kebutuhan penduduk seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, sampai lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat Program Keluarga Berencana yang menyeluruh di Indonesia termasuk daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009). Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran agar lebih terkontrol, untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah kebijakan yang dikategorikan dalam tiga tahapan, yakni menjarangkan, menunda, dan menghentikan, maksud dari kebijakan tersebut untuk menyelamatkan ibu dan anak dari kematian akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua (Hartanto, 2003). Namun, hal tersebut masih perlu penyesuaian kebijakan dengan program pembangunan di segala lini baik

secara kualitas atau kuantitas sampai persebaran penduduk sesuai dengan sumber daya alam dan daya tampung di setiap wilayah (BKKBN, 2011a).

Di tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat 4 terbesar di dunia (BKKBN, 2016), namun banyaknya penduduk tersebut tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena tidak meratanya akses serta pengetahuan kepada masyarakat. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia , Nomor 52 Tahun 2009), keluarga berkualitas adalah keluarga yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan masyarakat bukan lagi persoalan personal, keluarga atau kelompok, melainkan merupakan persoalan bersama, dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban memenuhi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya. Komponen individu, keluarga, kelompok, dan negara tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya, karena kesejahteraan satu orang saja dari masyarakat, akan berdampak dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan sebuah negara. Begitupun sebaliknya, kebijakan yang dibuat negara berkaitan dengan kesejahteraan kesejahteraan rakyatnya, baik komunitas maupun personal.

Program KB sangat menekankan pentingnya upaya menghormati hak-hak reproduksi, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pemakaian kontrasepsi bertujuan untuk pengaturan kelahiran, meningkatkan

akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian, keikutsertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana (KB), serta upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, serta mempromosikan hak dan kesehatan reproduksi (BKKBN, 2011a). Banyak metode KB atau Metode Kotrasepsi yang dapat digunakan, namun terdapat jenis KB yang dapat mencegah kehamilan secara permanen, metode tersebut adalah adalah metode KONTAP (Kontrasepsi Mantap) yang terdiri dari Metode Operasi Pria (Vasektomi) dan Metode Operasi Wanita (Tubektomi), keduanya menggunakan metode operasi dalam penerapannya. Namun, di Kota Surabaya cakupan KB MOP merupakan yang paling rendah yakni hanya sebesar 1.592 pengguna atau hanya sebesar 0,40% dari seluruh jenis KB yang digunakan di Kota Surabaya (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019).

1.2 Identifikasi Masalah

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Ibu Kota Jakarta dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kota Surabaya memiliki angka kelahiran terbesar di Jawa Timur sebanyak 44.455 kelahiran (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2019). Kelurahan Putat Jaya memiliki jumlah penduduk terbesar nomor 2 terbesar di Kota Surabaya setelah Kecamatan Sawahan yakni sebanyak 143.856 penduduk, dengan pasangan usia subur (PUS) sebanyak 7.991 pasangan, namun tidak ada sama

sekali cakupan kontrasepsi MOP di Kelurahan Putat Jaya ini dalam hal ini sebesar 0% (Koordinator PKB Kecamatan Sawahan, 2021). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sutinah (2017) di Kota Surabaya, dengan 150 sampel, menemukan bahwa sekitar setengah dari populasi laki-laki dalam penelitian tersebut tidak pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tentang KB karena mereka menganggap bahwa program tersebut ditujukan untuk perempuan, pengetahuan masyarakat kota maupun desa terhadap program KB belum berkembang secara optimal, meski dari segi pendidikan masyarakat kota pada umumnya lebih maju dari masyarakat pedesaan. Masih terdapat pengetahuan yang keliru dan kurang terhadap Program KB, misalnya tentang kontrasepsi MOP yang dalam beberapa hal ditakutkan akan bisa menyebabkan impoten, sedangkan penggunaan kondom di sebagian besar kaum laki-laki dianggap merepotkan, dan dipersepsikan hanya untuk penderita atau mencegah penyakit kelamin dan HIV/ AIDS saja. Berbagai persepsi keliru seperti ini yang menyebabkan partisipasi kaum laki-laki dalam program KB menjadi sangat terbatas. Hal ini merupakan salah satu masalah yang cukup mendasar dalam pelaksanaan kontrasepsi bagi laki-laki dari sisi pengetahuan mengenai kontrasepsi itu sendiri.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”faktor individu apa saja yang mempengaruhi pria dengan anak lebih dari tiga terhadap niat menggunakan Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria)?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor individu yang mempengaruhi pria dengan anak lebih dari tiga terhadap niat menggunakan Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria) di Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi *background factors* yang terdiri dari usia, pendidikan, pengetahuan pria dengan anak lebih dari tiga serta informasi mengenai Kontrasepsi MOP dari PKB di Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya.
2. Mengidentifikasi *attitude toward the behavior, subjective norm, perceived behavior control*, dan niat menggunakan Kontrasepsi MOP pada pria dengan anak lebih dari tiga di Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya

3. Menganalisis pengaruh *attitude toward the behavior* terhadap niat menggunakan Kontrasepsi MOP pada pria dengan anak lebih dari tiga di Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya.
4. Menganalisis pengaruh *subjective norm* terhadap serta niat menggunakan Kontrasepsi MOP pada pria dengan anak lebih dari tiga di Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya.
5. Menganalisis pengaruh *perceived behavior control* terhadap niat menggunakan Kontrasepsi MOP pada pria dengan anak lebih dari tiga di Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya.

1.4.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi tambahan referensi serta acuan dalam pengembangan pengetahuan penelitian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pria dengan anak lebih dari tiga terhadap niat menggunakan Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat mengasah kemampuan peneliti dalam merancang konsep penelitian dan menambah wawasan peneliti dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pria dengan anak lebih dari tiga terhadap niat menggunakan Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria).

c. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi responden untuk menambah wawasan dan kesadaran mereka betapa pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dan berpartisipasi dalam program Kontrasepsi MOP demi perencanaan keluarga yang sejahtera.

d. Bagi tempat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan evaluasi dalam memberikan pelayanan terhadap pria usia subur terlalu banyak anak mengenai program Kontrasepsi MOP, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan konseling yang diberikan kepada pria dengan anak lebih dari tiga.

e. Bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai penatalaksanaan program Kontrasepsi MOP pada pria dengan anak lebih dari tiga, sehingga program KB

8
dapat terlaksana dengan efektif dan tujuan yang diinginkan
tercapai.